

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DiGiPay SATU DALAM PENGELOLAAN BELANJA NEGARA DI MTsN 12 TABALONG**Latifah**

Prodi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail : latifahmusthafa@gmail.com

Diterima: 1/1/2026; Direvisi: 8/1/2026; Diterbitkan: 15/1/2026

ABSTRAK

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan sektor publik menjadi agenda penting pemerintah Indonesia, termasuk pada satuan pendidikan negeri. Salah satu bentuk implementasinya adalah penerapan sistem pembayaran digital DiGiPay Satu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas belanja negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi DiGiPay Satu dalam pengelolaan belanja negara di MTsN 12 Tabalong serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif terbatas, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan kerangka teori Digital Governance dan Institutional Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi DiGiPay Satu belum berjalan optimal akibat adanya degradasi performa sistem yang bersifat siklus pada periode awal bulan, kompleksitas alur transaksi, rendahnya literasi digital serta resistansi sumber daya manusia, dan keterbatasan jumlah vendor yang terintegrasi dengan sistem. Meskipun demikian, penerapan DiGiPay Satu memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah melalui pencatatan transaksi secara digital dan terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan digitalisasi pengelolaan belanja negara di satuan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, perubahan budaya kerja, serta penguatan ekosistem pendukung, khususnya keterlibatan vendor lokal.

Kata Kunci: *DiGiPay Satu, sistem pembayaran digital, digital governance, pengelolaan keuangan madrasah*

ABSTRACT

Digital transformation in public sector financial management has become an important agenda of the Indonesian government, including in public educational institutions. One form of its implementation is the adoption of the DiGiPay Satu digital payment system developed by the Directorate General of Treasury to enhance transparency, efficiency, and accountability in state expenditure. This study aims to provide an in-depth analysis of the implementation of DiGiPay Satu in managing state expenditure at MTsN 12 Tabalong and to identify the challenges encountered in its application. The research employs a qualitative approach with an intrinsic case study design. Data were collected through in-depth interviews with key informants, limited participatory observation, and documentation, and were analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña, guided by the frameworks of Digital Governance and Institutional Theory. The findings indicate that the implementation of DiGiPay Satu has not yet been optimal due to cyclical system performance degradation at the beginning of each month,

the complexity of transaction workflows, low digital literacy and resistance among human resources, and the limited number of vendors integrated into the system. Nevertheless, the implementation of DiGiPay Satu has had a positive impact on improving transparency and accountability in madrasah financial management through digitally recorded and integrated transactions. This study concludes that the success of digitalizing state expenditure management in educational institutions is determined not only by technological readiness but also by human resource preparedness, changes in work culture, and the strengthening of supporting ecosystems, particularly the involvement of local vendors.

Keywords: *DiGiPay Satu, digital payment system, digital governance, madrasah financial management*

PENDAHULUAN

Gelombang revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi secara masif dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi katalisator utama dalam mendorong transformasi digital yang menyeluruh di berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali pada sektor pendidikan dan pemerintahan. Fenomena ini memaksa institusi publik untuk beradaptasi dengan cepat guna meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola organisasi. Salah satu dimensi paling krusial dalam transformasi ini adalah modernisasi sistem pembayaran yang beralih dari metode konvensional menuju sistem digital yang terintegrasi. Perubahan paradigma ini bukan sekadar tren teknologi, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang memiliki tingkat transparansi tinggi, efisiensi operasional yang maksimal, serta akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di Indonesia, agenda digitalisasi pengelolaan belanja negara telah ditetapkan sebagai prioritas strategis pemerintah untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Strategi ini diwujudkan melalui dorongan regulasi yang mewajibkan penggunaan aplikasi digital dan instrumen pembayaran non-tunai atau *cashless* dalam setiap transaksi pemerintah, guna menutup celah inefisiensi dan potensi penyimpangan anggaran (Alif et al., 2025; Tamrin et al., 2024; Utami & Sartika, 2025).

Sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintah pusat tersebut, berbagai satuan pendidikan di daerah mulai mengambil langkah progresif untuk mengadopsi sistem pembayaran digital sebagai bagian integral dari upaya peningkatan manajemen administrasi dan keuangan sekolah. Langkah ini merupakan respons adaptif lembaga pendidikan terhadap tuntutan zaman yang mengharuskan kecepatan dan ketepatan dalam pelaporan dana publik. Salah satu inovasi teknologi finansial yang kini mulai diperkenalkan dan diterapkan secara bertahap pada Lembaga Pendidikan Negeri, seperti yang terjadi di MTsN 12 Tabalong, adalah penggunaan *platform* DiGiPay Satu. Sistem ini merupakan sebuah *marketplace* pemerintah yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital, yang dikembangkan secara khusus oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuan utama dari peluncuran *platform* ini adalah untuk mendigitalisasi dan memodernisasi seluruh siklus pengelolaan belanja negara, memfasilitasi transaksi belanja operasional secara transparan, serta menyederhanakan mekanisme pembayaran langsung kepada pihak ketiga atau vendor tanpa melalui perantara tunai yang berisiko (Nugraha et al., 2025; Sendika & Frinaldi, 2025; Sutarsih et al., 2024).

Implementasi sistem DiGiPay Satu di lingkungan pendidikan diharapkan mampu menjadi solusi komprehensif untuk meminimalkan berbagai risiko kesalahan administrasi yang sering terjadi pada metode manual, mempercepat proses transaksi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan validitas pencatatan keuangan negara. Penerapan teknologi ini pada level

sekolah atau madrasah memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar penggunaan aplikasi pembayaran digital semata; hal ini menegaskan posisi strategis madrasah sebagai entitas yang mampu menjadi pelopor transformasi tata kelola keuangan pada satuan pendidikan di tingkat daerah. Analisis terhadap penerapan sistem ini sangat relevan jika ditinjau dari perspektif *digital governance*, yang menekankan betapa pentingnya peran teknologi informasi dalam mendorong efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik (Primansyah et al., 2025; Ratnawati et al., 2025). Selain itu, fenomena adopsi teknologi ini juga dapat dijelaskan melalui kacamata teori institusional, yang menggambarkan bagaimana tekanan regulatif dari pemerintah pusat serta tekanan normatif untuk mengikuti standar modernisasi memengaruhi keputusan organisasi sektor publik dalam mengadopsi sistem digital baru ke dalam rutinitas operasional mereka (Dalimunthe et al., 2024; Sutarsih et al., 2024).

Berbagai kajian akademis terdahulu telah memberikan bukti empiris bahwa penerapan sistem keuangan berbasis digital memiliki kemampuan signifikan untuk meningkatkan efisiensi alur kerja dan transparansi pengelolaan dana di sektor publik. Aplikasi keuangan digital dinilai berkontribusi besar dalam meminimalkan celah penyimpangan anggaran atau *fraud*, meskipun tingkat keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan komitmen kuat dari pimpinan lembaga. Selain itu, literatur yang ada juga menegaskan bahwa aparatur sipil negara di era modern dituntut untuk menguasai empat pilar literasi digital guna meningkatkan pelayanan, yaitu kemampuan teknis atau *digital skills*, etika di ruang maya atau *digital ethics*, keamanan data atau *digital safety*, serta kemampuan membangun budaya kerja digital atau *digital culture*. Namun demikian, kajian yang secara spesifik membahas implementasi *platform* DiGiPay Satu di lingkungan madrasah masih tergolong sangat langka. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih banyak memotret implementasi sistem keuangan pada instansi pemerintah berskala besar atau fokus pada aplikasi lain seperti SAKTI atau SIMDA. Kesenjangan literatur ini membuka ruang urgensi untuk meneliti secara spesifik bagaimana dinamika implementasi DiGiPay Satu di MTsN 12 Tabalong.

Meskipun digitalisasi menawarkan janji efisiensi, realitas di lapangan sering kali menghadirkan tantangan teknis yang kompleks. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti terkait implementasi DiGiPay Satu di MTsN 12 Tabalong, ditemukan berbagai kendala operasional yang menghambat kelancaran penggunaan sistem. Salah satu masalah teknis yang paling menonjol adalah terjadinya degradasi performa aksesibilitas *platform* yang terjadi secara konsisten dan berulang setiap bulannya. Penurunan kinerja sistem ini, yang sering kali berupa *server down* atau *loading* yang sangat lambat, umumnya terjadi pada periode krusial awal bulan, tepatnya antara tanggal 1 hingga tanggal 15. Kondisi ini sangat mengganggu ritme kerja bendahara dan operator keuangan yang harus mengejar tenggat waktu pelaporan. Selain masalah stabilitas jaringan, isu ini diperparah oleh kompleksitas alur proses transaksi di dalam *platform* itu sendiri. Antarmuka pengguna atau *user interface* yang tersedia dinilai belum ramah pengguna, dengan langkah-langkah verifikasi berjenjang yang rumit, sehingga justru menghambat efisiensi waktu pengguna yang seharusnya bisa bekerja lebih cepat dengan bantuan teknologi.

Selain kendala teknis yang bersumber dari sistem aplikasi, hambatan signifikan juga ditemukan dari sisi kesiapan sumber daya manusia dan ekosistem pendukung. Observasi lapangan menunjukkan adanya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah dalam beradaptasi dengan perubahan paradigma dari sistem pengelolaan keuangan manual menuju sistem digital sepenuhnya. Gagap teknologi dan keengganan untuk meninggalkan zona nyaman cara kerja lama mengindikasikan adanya resistansi psikologis terhadap inovasi teknologi di kalangan staf administrasi. Masalah internal ini semakin diperberat oleh kondisi

eksternal, di mana ekosistem *marketplace* pemerintah belum terbentuk secara matang di daerah tersebut. Jumlah vendor atau penyedia barang dan jasa lokal yang terdaftar dan terintegrasi dalam *platform* DiGiPay Satu masih sangat minim. Kelangkaan mitra penyedia ini berakibat fatal pada keterbatasan ruang lingkup transaksi yang dapat dilakukan oleh madrasah, sehingga tujuan untuk mendigitalkan seluruh belanja operasional menjadi sulit tercapai karena barang yang dibutuhkan tidak tersedia di sistem.

Berangkat dari paparan latar belakang konseptual dan temuan masalah empiris di lapangan tersebut, penelitian ini menjadi memiliki nilai relevansi dan urgensi yang sangat tinggi untuk dilaksanakan segera. Adanya kesenjangan antara harapan ideal pemerintah akan terciptanya tata kelola keuangan digital yang mulus dengan realitas kendala teknis dan manusiawi di tingkat madrasah menuntut sebuah investigasi ilmiah yang serius. Penelitian ini dirancang untuk melakukan analisis mendalam atau *in-depth analysis* mengenai proses implementasi sistem pembayaran digital DiGiPay Satu dalam pengelolaan belanja negara di MTsN 12 Tabalong. Fokus utama penelitian tidak hanya sekadar mendeskripsikan penggunaan aplikasi, tetapi menitik pada bagaimana satuan pendidikan tersebut menghadapi dan menyiasati tantangan-tantangan yang telah teridentifikasi, mulai dari hambatan infrastruktur sistem hingga resistansi kultural SDM. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan untuk menyempurnakan ekosistem pembayaran digital di sektor pendidikan, khususnya di lingkungan madrasah yang memiliki karakteristik unik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik yang berlokasi secara spesifik di MTsN 12 Tabalong. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena implementasi sistem pembayaran digital dalam konteks alaminya tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian. Sumber data utama diperoleh dari informan kunci yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan, meliputi Kepala Madrasah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran selaku operator sistem, serta staf administrasi terkait. Selain itu, peneliti juga melibatkan informan eksternal dari pihak vendor atau penyedia barang dan jasa lokal untuk mendapatkan perspektif yang berimbang mengenai ekosistem transaksi digital tersebut. Data pendukung lainnya dikumpulkan melalui penelusuran dokumen resmi, arsip laporan transaksi keuangan, serta kebijakan internal madrasah yang relevan dengan prosedur operasional standar penggunaan aplikasi *DiGiPay Satu* di lingkungan satuan pendidikan tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang komprehensif untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan. Teknik pertama adalah wawancara mendalam yang dilakukan secara intensif dengan para informan kunci yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* dan dikembangkan dengan *snowball sampling*. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi, kendala teknis, serta pengalaman subjektif pengguna terkait performa sistem yang sering mengalami gangguan siklus bulanan. Teknik kedua adalah observasi partisipatif terbatas, di mana peneliti mengamati secara langsung alur kerja bendahara dalam mengoperasikan aplikasi, tingkat *usability* sistem, serta respons pengguna terhadap kompleksitas fitur yang ada. Teknik ketiga adalah dokumentasi, yang difokuskan pada pengumpulan bukti fisik terkait kendala teknis seperti tangkapan layar *error* sistem atau log aktivitas transaksi. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan peneliti untuk memotret realitas implementasi secara utuh dari berbagai sudut pandang.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data mentah yang terkumpul dari lapangan dipilah, disederhanakan, dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama seperti hambatan teknis, kesiapan sumber daya manusia, dan dukungan ekosistem vendor. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap pola hubungan antarfenomena. Peneliti kemudian melakukan interpretasi mendalam dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka kerja *Digital Governance* dan *Institutional Theory* untuk menjelaskan mengapa fenomena resistansi dan keterbatasan adopsi terjadi. Kesimpulan akhir ditarik secara bertahap melalui proses verifikasi yang berulang guna memastikan bahwa hasil analisis benar-benar merefleksikan dinamika implementasi sistem pembayaran digital di lokasi penelitian secara akurat dan objektif.

HASIL

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran digital DiGiPay Satu di MTsN 12 Tabalong belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala teknis, sumber daya manusia, serta kesiapan ekosistem pendukung. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem keuangan digital sektor publik sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan organisasi pengguna. Berikut penjelasan hasil temuan peneliti di lapangan.

Teknis Operasional

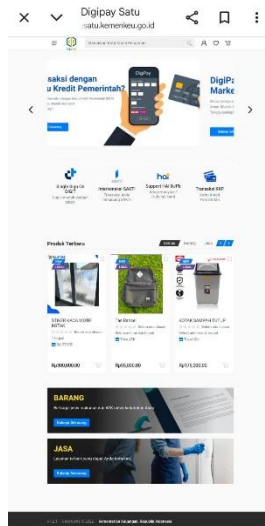
Tabel 1. Kondisi Teknis Operasional Sistem DiGiPay Satu pada MTsN 12 Tabalong

Jenis Hambatan Teknis	Frekuensi Kejadian/Bulan	Persentase Dampak terhadap Proses Transaksi	Kategori Dampak
Timeout sistem pada awal bulan (tgl 1–5)	8–12 kali	45% transaksi tertunda	Transaksi sering mengalami timeout
Akses sangat lambat (tgl 6–15)	6–9 kali	30% transaksi melampaui waktu normal	Waktu proses >30 menit/transaksi
Error pada tahap rekonsiliasi	3–5 kali	15% transaksi perlu pengulangan	Transaksi harus diulang

Aspek teknis operasional yang dapat dilihat pada tabel 1 mengalami penurunan performa pada periode awal bulan akibat lonjakan volume transaksi secara nasional. Hal tersebut terjadi karena akibat dari kombinasi faktor teknis sistem dan faktor organisasi pengguna. Pertama, pada rentang tanggal 1–15 setiap bulan terjadi lonjakan volume transaksi secara nasional karena seluruh satuan kerja pemerintah melakukan proses penyerapan anggaran, pencatatan, dan rekonsiliasi belanja secara bersamaan. Lonjakan aktivitas ini berdampak pada beban server dan kapasitas sistem yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi trafik tinggi secara simultan, sehingga memicu keterlambatan akses dan kegagalan sistem (*timeout*). Sebagaimana ditemukan dalam studi *digital government* di sektor publik lainnya (OECD, 2020).

Kemudian kompleksitas alur transaksi DiGiPay Satu yang terdiri dari beberapa tahapan verifikasi dan rekonsiliasi menyebabkan proses transaksi menjadi semakin rentan terhadap gangguan sistem. Setiap tahapan membutuhkan sinkronisasi data antar subsistem, sehingga

ketika terjadi penurunan performa pada salah satu bagian sistem, keseluruhan alur transaksi ikut terhambat. Kondisi ini memperpanjang waktu penyelesaian transaksi dan menurunkan efisiensi kerja Bendahara Pengeluaran. Selain itu, belum adanya mekanisme penjadwalan transaksi yang fleksibel dan adaptif di tingkat satuan kerja menyebabkan aktivitas transaksi terpusat pada periode waktu yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain implementasi DiGiPay Satu masih berorientasi pada kepatuhan administratif, belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek manajemen beban sistem dan variasi kapasitas pengguna di tingkat operasional.



Gambar 1. Aplikasi DiGiPay

Dengan demikian, degradasi performa sistem DiGiPay Satu pada periode awal bulan tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan teknis sistem, tetapi juga oleh ketidaksiapan desain proses, kapasitas infrastruktur, dan kemampuan pengguna, yang secara kolektif mempengaruhi efektivitas implementasi sistem pembayaran digital di madrasah.

Pembahasan

Analisis mendalam terhadap hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran digital *DiGiPay Satu* di lingkungan MTsN 12 Tabalong belum berjalan secara optimal dan menghadapi berbagai tantangan multidimensi. Temuan data kuantitatif menyoroti adanya hambatan teknis yang signifikan, terutama pada periode krusial di awal bulan, di mana hampir separuh transaksi mengalami kegagalan atau penundaan akibat gangguan *timeout* pada server. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas infrastruktur peladen pusat dengan volume permintaan akses yang melonjak secara serentak dari seluruh satuan kerja pemerintah di Indonesia. Ketika ribuan pengguna berusaha melakukan penyerapan anggaran dan rekonsiliasi belanja dalam jendela waktu yang bersamaan, terjadi *bottleneck* atau penyumbatan lalu lintas data yang parah. Kondisi ini menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi di tingkat pusat masih menjadi titik lemah yang menghambat kelancaran operasional di tingkat daerah, menciptakan inefisiensi waktu yang justru kontraproduktif dengan semangat digitalisasi yang seharusnya mempercepat proses birokrasi (Alif et al., 2025; Habibani & Frinaldi, 2025; Hanifah & Frinaldi, 2025).

Masalah teknis ini semakin diperburuk oleh kompleksitas desain arsitektur sistem *DiGiPay Satu* yang terkesan kaku dan sangat birokratis. Alur transaksi yang dirancang melibatkan berbagai tahapan verifikasi dan rekonsiliasi data yang harus tersinkronisasi secara *real-time* antar subsistem. Kerumitan ini membuat sistem menjadi sangat rentan; kegagalan pada satu titik verifikasi kecil dapat menyebabkan keseluruhan proses transaksi terhenti dan harus diulang dari awal. Hal ini berdampak langsung pada beban kerja Bendahara Pengeluaran

yang harus mengalokasikan waktu ekstra hanya untuk memastikan satu transaksi berhasil. Selain itu, ketiadaan mekanisme penjadwalan transaksi yang adaptif memperparah beban sistem pada jam-jam sibuk. Hal ini mencerminkan bahwa pengembangan sistem ini tampaknya lebih memprioritaskan aspek kepatuhan administratif dan kontrol ketat, namun kurang memperhatikan aspek pengalaman pengguna atau *user experience* serta manajemen beban kerja operasional yang realistis di lapangan (Fatkhuri et al., 2024; Munandar & Santoso, 2025; Suranto, 2022).

Di samping kendala teknis, aspek kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan internal yang sangat mendasar dalam adopsi teknologi finansial ini. Penelitian menemukan bahwa tingkat literasi digital para pengelola keuangan madrasah masih belum merata, yang berujung pada munculnya resistansi psikologis terhadap perubahan. Latar belakang pengguna yang telah terbiasa selama bertahun-tahun dengan prosedur manual menciptakan zona nyaman yang sulit ditinggalkan. Prosedur konvensional dianggap lebih nyata, terkendali, dan minim risiko kesalahan teknis dibandingkan dengan sistem digital yang abstrak dan penuh dengan istilah-istilah baru. Pola pikir ini membentuk hambatan kultural yang kuat, di mana pengguna cenderung skeptis dan merasa cemas ketika harus berinteraksi dengan antarmuka digital yang rumit. Akibatnya, motivasi untuk beralih sepenuhnya ke sistem digital menjadi rendah, dan pengguna sering kali kembali ke cara lama ketika menghadapi kendala teknis sedikit saja, yang menghambat proses transformasi digital institusi secara keseluruhan (Jagadhita, 2025; Sulistiarini et al., 2025; Susilawati et al., 2023).

Resistansi sumber daya manusia ini juga berakar pada ketimpangan antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan riil di lapangan, serta ketakutan terhadap risiko administratif. Pelatihan yang selama ini diselenggarakan cenderung bersifat sosialisasi umum dan kurang menyentuh aspek penyelesaian masalah atau *troubleshooting* teknis yang sering dihadapi sehari-hari. Ketika pengguna menemui pesan *error* atau kegagalan sistem, mereka tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk menanganinya secara mandiri. Situasi ini diperparah oleh bayang-bayang risiko audit dan pertanggungjawaban keuangan negara yang ketat. Ketakutan akan kesalahan input data yang dapat berujung pada temuan pemeriksaan membuat pengelola keuangan bersikap sangat hati-hati, bahkan cenderung defensif. Mereka lebih memilih jalan aman dengan menggunakan metode manual yang sudah mereka kuasai sepenuhnya daripada mengambil risiko menggunakan sistem digital yang belum mereka pahami secara utuh, sehingga adopsi teknologi berjalan lambat (Klyton et al., 2020; Nurdin et al., 2020; Susilowati et al., 2023).

Tantangan implementasi tidak hanya datang dari sisi internal madrasah, tetapi juga dari ketidaksiapan ekosistem eksternal, khususnya dari sisi penyedia barang dan jasa atau *vendor*. Keterbatasan jumlah mitra usaha yang terintegrasi dalam platform *DiGiPay Satu* menjadi hambatan struktural yang serius. Banyak vendor lokal, yang sebagian besar adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital. Bagi mereka, bergabung dengan ekosistem digital ini berarti harus menghadapi prosedur administrasi tambahan yang dianggap membebani. Persepsi bahwa sistem digital itu rumit, kaku, dan menuntut verifikasi berlapis membuat para vendor enggan untuk berpartisipasi. Mereka membandingkannya dengan transaksi konvensional yang lebih cair dan fleksibel, sehingga insentif untuk beralih ke platform digital dirasa kurang menarik dibandingkan dengan kerumitan yang harus mereka hadapi.

Kondisi ekosistem eksternal yang belum matang ini juga mencerminkan adanya ketimpangan fokus dalam strategi sosialisasi dan penerapan kebijakan. Upaya pemerintah selama ini terlihat sangat gencar dalam menekan satuan kerja untuk menggunakan sistem digital

(tekanan koersif), namun kurang memberikan perhatian pada edukasi dan pendampingan bagi para mitra penyedia. Dari perspektif teori institusional, belum terbentuk tekanan normatif maupun mimetik yang cukup kuat di pasar lokal yang dapat mendorong vendor untuk secara sukarela mengadopsi teknologi ini. Akibatnya, terjadi kesenjangan digital antara pembeli (madrasah) yang dituntut serba digital, dengan penjual (vendor) yang masih beroperasi secara analog. Ketidaksinkronan ini menghambat terciptanya pasar digital yang efisien, karena madrasah kesulitan mencari penyedia yang bersedia bertransaksi melalui aplikasi, yang pada akhirnya memaksa madrasah untuk tetap melakukan pengadaan secara manual di luar sistem yang telah ditetapkan.

Terlepas dari berbagai hambatan teknis dan operasional yang dihadapi, implementasi *DiGiPay Satu* tetap memberikan implikasi positif yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam aspek tata kelola keuangan. Penerapan sistem ini secara bertahap telah meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas di MTsN 12 Tabalong. Setiap transaksi yang berhasil diproses melalui sistem ini meninggalkan jejak digital atau *digital footprint* yang permanen, detail, dan mudah ditelusuri. Hal ini secara signifikan menutup celah potensi manipulasi data, mark-up harga, atau ketidaktertiban administrasi yang sering terjadi pada sistem manual. Keberadaan data transaksi yang terpusat memudahkan proses monitoring dan audit, menjamin integritas penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, meskipun saat ini masih banyak kendala, sistem ini memiliki potensi besar sebagai instrumen reformasi birokrasi, dengan catatan perlunya perbaikan menyeluruh pada kapasitas server, penyederhanaan antarmuka pengguna, pelatihan SDM yang intensif, serta pembinaan ekosistem vendor yang lebih masif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sistem pembayaran digital *DiGiPay Satu* di MTsN 12 Tabalong telah menjadi katalisator penting dalam transformasi tata kelola keuangan sektor publik, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas belanja negara. Adopsi platform ini memungkinkan terciptanya jejak audit digital yang permanen, yang secara signifikan meminimalkan risiko manipulasi data dan menutup celah penyimpangan anggaran yang kerap terjadi pada sistem konvensional. Mekanisme pencatatan transaksi yang terintegrasi dan real-time memberikan jaminan integritas penggunaan dana publik, selaras dengan prinsip *good governance* yang menekankan keterbukaan informasi. Meskipun demikian, efektivitas sistem ini masih terhambat oleh kendala teknis struktural, terutama degradasi performa peladen pada periode krusial awal bulan akibat lonjakan trafik nasional, serta antarmuka pengguna yang dinilai terlalu kompleks dan kaku. Hambatan infrastruktur ini menciptakan bottleneck operasional yang justru mengurangi efisiensi waktu kerja bendahara, menegaskan perlunya penyempurnaan arsitektur teknologi agar lebih responsif terhadap beban transaksi masif.

Tantangan implementasi *DiGiPay Satu* tidak hanya bersumber dari aspek teknis, melainkan juga berakar kuat pada faktor kesiapan sumber daya manusia dan kematangan ekosistem pendukung di tingkat lokal. Rendahnya literasi digital dan resistansi kultural staf administrasi terhadap perubahan prosedur kerja menghambat adopsi penuh sistem ini, di mana banyak pengguna masih merasa lebih nyaman dengan metode manual yang dianggap lebih minim risiko administratif. Situasi ini diperparah oleh kelangkaan vendor lokal yang terintegrasi dalam platform, mengakibatkan ketimpangan antara tuntutan regulasi belanja digital dengan ketersediaan pasokan barang di pasar daring pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi belanja negara di satuan pendidikan menuntut pendekatan holistik yang melampaui sekadar instalasi aplikasi. Diperlukan strategi komprehensif yang mencakup pelatihan intensif berbasis pemecahan masalah bagi operator, penyederhanaan alur birokrasi

digital, serta insentif bagi vendor lokal untuk bergabung dalam ekosistem, guna mewujudkan sistem keuangan yang benar-benar efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, N., Muliati, M., & Ashariana, A. (2025). Implementasi kebijakan electronic government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 233. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4279>
- Dalimunthe, I. S., Fitriisa, A., & Fatimah, S. (2024). Transformasi digital dan filsafat kepemimpinan dalam birokrasi: Tantangan dan peluang. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 597. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.4006>
- Fatkhuri, F., Dharmawan, D., Febrian, W. D., Karyadi, S., & Sani, I. (2024). Application of heuristic evaluation method to evaluate user experience and user interface of personnel management information systems to improve employee performance. *Jurnal Informasi dan Teknologi*, 14. <https://doi.org/10.60083/jidt.v6i1.466>
- Habibani, R. A., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi budaya organisasi publik dalam era digital: Peluang dan strategi implementasi. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 407. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5365>
- Hanifah, Z., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi budaya organisasi di sektor publik: Strategi adaptasi terhadap disrupsi digital. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 296. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5377>
- Jagadhita, M. A. (2025). Transformasi digital sertifikat tanah dan respons masyarakat terhadap penerapannya. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1600. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12448>
- Klyton, A. V., Mesías, J. F. T., & Castaño-Muñoz, W. (2020). Innovation resistance and mobile banking in rural Colombia. *Journal of Rural Studies*, 81, 269. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.10.035>
- Munandar, F., & Santoso, H. B. (2025). User interface improvement by evaluating usability and user experience: Case study of Indonesia's Government Financial Management Information System. *Indonesian Journal of Computer Science*, 14(1). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v14i1.4630>
- Nugraha, A. G., Siahaan, S. M., & Hartono, H. (2025). Mengintegrasikan teknologi website dalam sistem penyimpanan bahan ajar untuk pendidikan modern. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 337. <https://doi.org/10.51878/learning.v5i1.4150>
- Nurdin, N., Azizah, W. N., & Rusli. (2020). Pengaruh pengetahuan, kemudahan dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan finansial technology (fintech) pada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2(2), 199. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.32.198-221>
- Primansyah, A., Bunyamin, B., & Nugrahani, D. (2025). Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam digitalisasi kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah dasar. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 127. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4688>
- Ratnawati, E., Arini, A., Azainil, A., Haeruddin, H., & Ahmad, M. R. (2025). Penerapan manajemen mutu terpadu penggunaan Chromebook untuk pembelajaran di SMP. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 524. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5731>



- Sendika, M., & Frinaldi, A. (2025). Transformasi budaya organisasi di sektor publik: Inovasi menuju pelayanan publik yang lebih responsif. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 371. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5376>
- Sulistiarini, I., Fatimah, & Wildan, M. A. (2025). Peran transformasi digital terhadap kompetensi SDM dan kemandirian BUMDes. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 14(9), 741. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2025.v14.i9.p05>
- Suranto, S. (2022). Pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna SAKTI pada KPPN Gorontalo. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(5), 1044. <https://doi.org/10.59188/jcs.v1i5.136>
- Susilawati, F. E., Yanti, R., & Erni, E. (2023). Transformasi digital pemerintah (Studi kasus: Implementasi e-government dan hambatnya). *Journal Social Society*, 3(2), 80. <https://doi.org/10.54065/jss.3.2.2023.338>
- Susilowati, E., Permadi, A., Hariyanti, S., Munir, M., & Wahyudi, A. B. (2023). Analysis of the implementation of digitalization of financial statements in micro, small, and medium enterprises. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 6(4), 1048. <https://doi.org/10.37275/oaijss.v6i4.170>
- Sutarsih, W., Haryati, T., & Wiyono, N. (2024). Peran digitalisasi sekolah terhadap mutu pendidikan. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), 136. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i1.2810>
- Tamrin, U., Ibrahim, I., & Syam, S. (2024). Penerapan good governance di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i1.2709>
- Utami, Y., & Sartika, I. (2025). Analisis bibliometrik kepemimpinan pemerintahan dalam transformasi digital. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 84. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4076>